



**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN ACTION PLAN KOTAPANJANG**



LAPORAN PELAKSANAAN 2003

**Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia**

I. PENDAHULUAN

Pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kotapanjang dilaksanakan sejak bulan Oktober 1992 hingga Nopember 1997. Total biaya proyek sebesar JPY 29,89 miliar, termasuk pinjaman lunak Jepang sebesar JPY 22,81, melalui Japan Bank for International Cooperation - JBIC, proyek IP-358 dan IP-374¹.

PLTA ini membendung Sungai Kampar Kanan dan menggenangi area seluas 124 km² (8 desa di Kabupaten Kampar², Propinsi Riau dan 2 desa di Kab. 50 Kota, Sumbar); dan pemindahan/resettlement 4.886 KK (4.152 KK di Kabupaten Kampar pada tahun 1992 dan 1996, dan 734 KK di Kabupaten 50 Kota selesai tahun 1993).

Proyek ini dilaksanakan berdasarkan hasil-hasil studi, diantaranya: studi Kelayakan (oleh JICA, 1982-84), studi Analisis Dampak Lingkungan (oleh Universitas Andalas, 1983), Detail Design (1987-88), Rencana Pengelolaan Lingkungan-RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan-RPL (oleh Tepsco dan Universitas Riau, 1988).

Tahap operasi komersial PLTA dimulai Januari 1998 untuk penyediaan tenaga listrik sebesar 114 MW dan jaringan interkoneksi Kotapanjang-Pekanbaru (150 kV, 70 km) dan Payakumbuh-Kotapanjang (150 kV, 83 km). Keberadaan PLTA ini telah memberikan manfaat dalam penghematan devisa, pengendalian banjir di hilir waduk dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Adanya tuntutan sebagian masyarakat yang terkena dampak (project affected family-PAF) pembangunan PLTA Kotapanjang atas kompensasi yang belum optimal dari Pemerintah Indonesia, serta kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang didukung oleh LSM Jepang, telah menempatkan permasalahan ini menjadi "isu utama" dalam kerjasama pembangunan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, selaku pemberi pinjaman bagi proyek PLTA Kotapanjang.

Perkembangan penanganan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, mendapat perhatian serius dan selalu menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan-pertemuan bilateral dengan pihak Jepang.

Beberapa dampak sosial dan lingkungan dalam pasca pembangunan PLTA Kotapanjang adalah:

A. Kabupaten Kampar, Riau

1. Pembangunan perkebunan karet seluas 6.892 ha yang dilaksanakan pada tahun 1991-1996 mengalami kegagalan karena tingkat kematian yang tinggi (85%). Hal ini terjadi akibat pelaksanaan penanaman yang telat musim

¹ Loan Agreement IP-358 yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 1990 dengan nilai pinjaman sebesar JPY 12,5 miliar dan IP-374 tertanggal 25 September 1991 senilai JPY 17,5 miliar, hanya terealisasi (total) sebesar JPY 22,81 miliar. Sedangkan porsi dana Pemerintah Indonesia sebesar JPY 7,08 miliar bersumber dari dana APBN, APBD dan PT. PLN (Persero).

² Saat ini, 8 desa di Kabupaten Kampar, Riau dimaksud telah berkembang menjadi 14 desa. Dengan demikian total desa yang terkena dampak sebanyak 16 desa (termasuk 2 desa di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat)

- (keterlambatan dalam pelaksanaan land clearing), bibit yang telah kadaluarsa, dan petani yang belum siap sehingga kurang pemeliharaan;
2. Fasilitas air bersih (sumur, pompa listrik dan instalasi air bersih) yang dibangun melalui proyek PLTA Kotapanjang, proyek transmigrasi, serta proyek infrastruktur untuk masyarakat miskin (P3DT) tidak berfungsi maksimal dan kondisi serta kualitas air tanah yang tidak layak dikonsumsi;
 3. Turunnya kualitas air waduk karena tingginya kandungan BOD, COD, dan H₂S;
 4. Tingginya angka sedimentasi, serta;
 5. Terganggunya keberadaan satwa liar (diperkirakan terdapat sekitar 30-40 ekor gajah dan harimau Sumatera) di sekitar lokasi dan areal cagar budaya Muara Takus.

B. Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat

1. Ganti rugi yang dianggap oleh sebagian masyarakat terkena dampak belum sepenuhnya tuntas. Hal ini terjadi karena luas lahan yang diganti dianggap tidak sesuai dan harga ganti rugi yang dianggap masyarakat terlalu rendah. Sebanyak 67 KK (dari desa Tanjung Pauh) dan 10 KK (dari desa Tanjung Balit) di Kabupaten 50 Kota, didukung oleh LSM lokal dan Jepang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pati. Putusan PN untuk gugatan Tanjung Balit telah terbit tanggal 10 Pebruari 1999) dan untuk Tanjung Balit terbit 8 Maret 2001. Selanjutnya, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 16 Januari 2002, yang menetapkan untuk memenangkan gugatan 10 KK dari desa Tanjung Pauh. Namun putusan ini tidak diterima oleh masyarakat penggugat sehingga menyatakan naik banding dengan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dilaporkan bahwa hingga saat ini, dilaporkan belum ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung.
2. Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan pada tahun 1991-1996 dapat dikatakan gagal karena kematian yang tinggi (sekitar 85%). Hal ini terjadi akibat pelaksanaan penanaman yang telat musim (land clearing terlambat), bibit yang kadaluarsa, dan petani yang belum siap sehingga kurang pemeliharaan.
3. Pada tanggal 5 September 2002, sebanyak 17 orang wakil PAFs yang didukung oleh pengacara dan LSM setempat, wakil dari Wahana Lingkungan-Wahli, mengadakan kunjungan Jepang dalam rangka kampanye untuk mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Jepang, JBIC, JICA dan Tepsco melalui Pengadilan Distrik Tokyo. Beberapa tuntutan yang diajukan, diantaranya: adanya meminta pernyataan "maaf" dari Pemerintah Jepang, ganti rugi sebesar JPY 5 juta/orang, dan menutup kembali PLTA Kotapanjang. Berdasarkan informasi yang diterima melalui JBIC perwakilan Jakarta, proses persidangan atas kasus ini di pengadilan Distrik Tokyo masih terus berjalan.
4. Fasilitas air bersih (sumur, pompa listrik dan instalasi air bersih) yang dibangun melalui proyek PLTA, proyek transmigrasi, dan proyek infrastruktur untuk masyarakat miskin (P3DT) saat ini tidak berfungsi. Berdasarkan informasi dan hasil kunjungan ke lapangan, PAFs mengalami kesulitan dalam

menanggung biaya operasional serta pemeliharannya. Pada tahun 2001, seorang mahasiswa Jepang yang sedang melakukan praktek kerja di desa Tanjung Pauh membangun pompa dan instalasi air bersih secara pribadi dan manfaatnya sangat dirasakan oleh PAFs setempat pada waktu itu. Namun proyek tersebut sekarang sudah tidak berfungsi lagi.

Sebagaimana tertuang dalam SK MENPPN/Kepala Bappenas No.KEP.264/M.PPN/05/2002 tertanggal 31 Mei 2002 mengenai Tim Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Action Plan Proyek Kotapanjang (lihat Lampiran - 1) dan sesuai dengan Minutes of Discussion (MOD) antara Pemerintah Indonesia dan Jepang tertanggal 7 Desember 2001 perihal peranan Bappenas dalam pengkoordinasian pelaksanaan action plan Kotapanjang (lihat Lampiran - 2), maka diperlukan adanya pembentukan Tim Koordinasi (Special Task force) yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya langkah-langkah dalam rangka mengatasi permasalahan Kotapanjang serta memantau perkembangannya.

Keberadaan dan peranan Tim sangat diperlukan dalam mengkoordinasikan penyusunan/formulasi action plan (countermeasures), pendanaan, maupun pelaksanaannya mengingat penanganan masalah Kotapanjang yang bersifat lintas sektoral sehingga melibatkan berbagai instansi seperti Departemen Pertanian (peternakan, perkebunan, dan jalan kebun), Departemen Kimpraswil (air bersih, jalan dan jembatan), Departemen Kelautan dan Perikanan (budidaya ikan), Departemen Kehutanan (perlindungan hutan dan konservasi alam), Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT. PLN (Persero); serta lintas regional yang melibatkan Pemerintah Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten 50 Kota (lihat Lampiran - 3).

Disamping fungsi di atas, Tim Koordinasi juga berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan study bantuan hibah JBIC melalui Tim Special Assistance for Project Sustainability (SAPS) pada periode bulan Pebruari 2002 s/d Maret 2003; serta pelaksanaan *JBIC-Long Term Post SAPS Monitoring* untuk periode Juli 2003 s/d Maret 2004, yang juga bertugas membantu Pemerintah Indonesia baik dalam penyusunan consolidated action plan maupun memantau pelaksanaannya secara langsung di lapangan (lihat Lampiran - 4).

II. PELAKSANAAN PENANGANAN DAMPAK KOTAPANJANG

Penanganan dampak pembangunan PLTA Kotapanjang telah dilakukan sejak pembangunan proyek (tahun 1992). Namun demikian, upaya penanganan yang telah dilaksanakan belum berjalan optimal dengan hasil sesuai yang direncanakan.

Penanganan yang belum optimal ini, meliputi penyelesaian ganti rugi lahan/kompensasi yang belum tuntas, adanya kegagalan pembangunan kebun karet, serta tidak memadainya sarana air bersih telah mengakibatkan "hilangnya" kepercayaan sebagian PAFs terhadap Pemerintah.

Dalam kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang (JBIC) yang tertuang dalam MOD, ditetapkan perlunya upaya untuk mengatasi dampak tersebut melalui penyusunan suatu rencana tindak (action plan) mulai tahun 2002.

Namun demikian, usulan action plan yang telah disusun berdasarkan studi komprehensif Universitas Andalas (untuk Propinsi Sumatera Barat); dan Universitas Riau (untuk Propinsi Riau) pada tahun 2002, disepakati perlu dikonsolidasikan kembali. Hal ini dilakukan guna memastikan telah tertampungnya aspirasi serta partisipasi PAFs dalam penyusunannya. Namun demikian, mengingat keterbatasan Pemerintah dalam pendanaannya serta kapasitas instansi terkait dalam pelaksanaannya, maka action plan disusun dan dilakukan secara bertahap.

Khusus kaitannya dengan masalah ganti rugi lahan, maka penyelesaiannya telah ditangani mengikuti proses atau jalur hukum dimana putusan-putusannya harus ditaati agar tidak menjadi preseden yang buruk dimasa mendatang.

Penanganan terhadap dampak Kotapanjang, secara rinci adalah sebagai berikut:

A. Penanganan Dampak sebelum Consolidated Action Plan

Upaya-upaya penanganan dampak PLTA Kotapanjang yang telah dilaksanakan sejak pembangunan proyek hingga TA 2001 (sebelum consolidated action plan) adalah sebagai berikut

i. Kabupaten Kampar, Riau

1. Sampai dengan Maret 1999, semua lahan milik masyarakat seluas 23.156,7 ha (terdiri dari 21.497 persil) yang terendam telah diberikan ganti rugi dengan total biaya sebesar Rp 58,9 miliar;
2. Pemindahan dan pemukiman kembali penduduk sebanyak 4.152 KK (3.446 KK pola bedol desa & 706 KK pola PIR Trans) telah selesai dilaksanakan, dimana setiap KK mendapat rumah sederhana 1 unit; lahan pangan 0,75 ha, lahan pekarangan 0,25 ha, dan lahan perkebunan 2 ha;
3. Pembangunan kebun karet untuk 3.446 KK telah dilaksanakan pada TA 1991/92 – 1995/96 tidak berhasil karena 85% tanaman mati. Mulai TA

1999/2000 telah dilakukan re-vegetasi karet seluas 6.892 ha dan pemeliharaan kebun dengan biaya sebesar Rp 39,9 miliar.

4. Pembangunan kebun kelapa sawit untuk 706 KK telah selesai dan berhasil dilaksanakan dimana tingkat keberhasilannya mencapai 80% sangat memuaskan dan 20% kurang memuaskan;
5. Pada TA 1998/99 s/d 2001 telah dilaksanakan Intensifikasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan jeruk manis dan pengembangan ternak unggas;
6. Pada TA 1998/99 s/d 2001 telah dilaksanakan Program pengembangan budidaya ikan (nila dan gurame) dan industri kecil pengolahan ikan;
7. Pada TA 1998/99 s/d 2001 telah dilaksanakan Pembangunan/pengerasan jalan (kelas C) dan jembatan, parit beton dan gorong-gorong.

ii. Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat

1. Pada TA 1993/94 telah dilaksanakan pemindahan sekitar 800 KK di desa Tanjung Pauh (lama) dan Tanjung Balit (lama) ke Rimbo Datar dengan prasarana pemukiman (jalan dan air bersih). Setiap KK mendapat perumahan sederhana 1 unit, lahan pekarangan 0,5 ha dan lahan kebun 2 ha;
2. Pada TA 1994/95 telah dilaksanakan penanaman kebun karet seluas 1.508 ha di Kabupaten 50 Kota. Pada TA 1999/2000 Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah melaksanakan land clearing (5.000 ha), re-vegetasi (3.500 ha) dan TA 2001 tambahan revegetasi (5.338 ha), namun terjadi kebakaran.
3. Pada TA 1999/2000 telah dilaksanakan rehabilitasi 9 unit sarana air bersih (sumur penampung), namun tetap tidak dapat dimanfaatkan oleh PAFs.

B. Penanganan melalui Consolidated Action Plan

Sebagaimana komitmen Pemerintah Indonesia guna menuntaskan penanganan Kotapanjang, maka upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dan pelaksanaan "rencana tindak atau action plan" yang melibatkan secara langsung partisipasi PAFs, disebut "consolidated action plan".

i. Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat

Consolidated Action Plan Sumbang (2002-2008) telah tersusun melalui workshop dengan seluruh stakeholders (tgl 27 Juli 2002). Total biaya yang diajukan untuk program prioritas sebesar Rp. 61,2 miliar, termasuk program yang perlu dibicarakan lebih lanjut (Lampiran – 5).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA 2002 dengan total biaya sebesar Rp. 1.707.000.000 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kegiatan pengukuran kembali batas lahan kebun karet di Tanjung Balit dan Tanjung Pauh, pengukuran daerah terisolir dampak genangan dan pengukuran batas tanah ulayat nagari serta sertifikasi lahan dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000 (APBD Propinsi Sumatera Barat) dan Rp. 114.000.000 (APBD Kabupaten 50 Kota);

2. Kegiatan sosialisasi dan seleksi calon petani dalam rangka pembangunan kebun karet dengan dana sebesar Rp. 343.000.000 (APBN melalui dana dekonsentrasi);
3. Program Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) untuk pengembangan perikanan budidaya di perairan waduk dengan alokasi dana sebesar Rp. 950.000.000 (APBN melalui dana dekonsentrasi);
4. Studi detail design untuk sarana air bersih dengan dana sebesar Rp 100.000.000 (APBD Propinsi Sumatera Barat).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA 2003 dengan total biaya sebesar Rp.13.780.000.000 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembangunan kebun karet seluas 700 ha (dari total seluas 1600 ha) serta pembangunan jalan kebun sepanjang 20 km dengan dana sebesar Rp. 6.120.000.000;
2. Pembangunan sarana air bersih, jembatan dan jalan lingkungan dengan dana sebesar Rp. 6.374.710.000;
3. Pengembangan usaha peternakan dengan dana sebesar Rp. 830.000.000 untuk pengadaan sapi potong sebanyak 186 ekor (1 ekor/KK);
4. Pengembangan usaha perikanan dengan dana sebesar Rp. 36.700.000 untuk restocking ikan nila (5-8 cm) sebanyak 60.000 ekor, temu teknis perairan umum, dan identifikasi calon lokasi kawasan restocking.

Lebih rinci mengenai pendanaan pelaksanaan consolidated action plan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat dapat dilihat dalam Tabel 1.

ii. Kabupaten Kampar, Riau

Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Propinsi Riau maupun Kabupaten Kampar, maka penanganan masalah Kotapanjang di Kabupaten Kampar untuk tahun 2004 dan selanjutnya tidak akan dilaksanakan secara khusus sebagaimana pendekatan penanganan yang dilakukan untuk Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, melainkan melalui program pembangunan reguler.

Dengan demikian, action plan yang akan dilaksanakan akan sejalan dengan rencana strategis (Renstra 2004-2008) dan program pembangunan daerah (Propeda). Sedangkan rencana penanganan dampak di Kabupaten Kampar, Riau untuk TA 2003 dapat dilihat pada Lampiran – 6

Kegiatan penanganan dampak yang dilaksanakan dalam TA 2002 dengan total biaya sebesar Rp. 5.845.000.000, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program pengembangan usaha kegiatan industri rumah tangga, pemeliharaan jeruk dan karet, pengadaan ayam buras dan sapi, pengembangan usaha pembenihan ikan rakyat, pembangunan irigasi, pemberdayaan usaha kecil (bantuan modal usaha), pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, pembangunan 30 unit sekolah dasar (dan

sarana pendidikan lainnya), melalui dana APBD Propinsi Riau sebesar Rp 5.500.000.000;

2. Pengembangan agribisnis ayam buras melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan alokasi dana dekonsentrasi APBN sebesar Rp. 345.000.000.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA 2003 dengan total biaya sebesar Rp. 29.138.000.000 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemeliharaan kebun karet tahun ke-3 seluas 5.338 ha sebesar Rp. 6.949.000.000 (APBD Propinsi Riau) dan tahun ke-4 seluas 1.554 ha sebesar Rp. 2.000.000.000 (APBN), termasuk rehabilitasi kebun seluas 1200 ha;
2. Pengembangan perikanan melalui penebaran benih ikan sebanyak 200.000 ekor oleh PT. PLN (Persero);
3. Pembangunan sarana air bersih untuk total 250 KK dengan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (APBN), untuk desa Batu Bersurat dan dana sebesar Rp. 707.764.000 (SBAB) untuk SIPAS (Sistem Pengolahan Air Sederhana di desa Batu Binamang dan Pongkai Istigomah);
4. Berbagai program lainnya dengan dana APBD Kabupaten Kampar sebesar Rp. 13.767.245.500 (termasuk pengembangan ternak kambing dan sapi; serta pengembangan kegiatan perikanan budidaya ikan emas, patin dan nila merah serta pengadaan jaring keramba dengan dana sebesar Rp. 345.000.000).

Lebih rinci mengenai pendanaan pelaksanaan consolidated action plan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat dapat dilihat dalam Tabel 2.

Dalam mengkoordinasikan pengalokasian pendanaan serta memantau perkembangan pelaksanaan action plan di kedua lokasi terkena dampak, Tim menyelenggarakan pertemuan-pertemuan guna memfasilitasi dan mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi. Disamping itu, melalui Tim Pengarah dan Tim Teknis juga menyampaikan surat ke berbagai instansi terkait guna percepatan pelaksanaan yang mengalami kegiatan-kegiatan yang mengalami keterlambatan.

Rincian kegiatan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Tim dapat dilihat dalam Tabel 3, 4 dan 5; serta dalam Lampiran – 7, 8 dan 9.

TABEL 1
PENDANAAN PELAKSANAAN CONSOLIDATED ACTION PLAN KOTOPANJANG
KABUPATEN 50 KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Kegiatan	Realisasi TA 2002		Realisasi TA 2003		Kebutuhan	Perkiraan Alokasi 1)	T A 2004	Keterangan
		Jumlah (juta Rp.)	Sumber Dana	Jumlah (juta Rp.)	Sumber Dana				
1	Pembangunan Perkebunan	343	APBN APBD Prop.	6,120	APBN	9,100	6,120		Penanaman 450 ha, jalan kebun 20 km, dan pemeliharaan (P1) seluas 700 ha
2	Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Jalan Lingkung	200 114 100	APBD Prop. APBD Kab. APBD Prop.	6,375 185	APBN APBD Prop.	2,000	2,000		Pembangunan jembatan semi permanen dan jalan lingkung
3	Pembangunan Usaha Peternakan	3)		830	APBN	1,170	830		Pengadaan 263 ekor sapi
4	Pembangunan Usaha Perikanan	950	APBN	-		900	2)		Penanganan perikanan secara lintas provinsi (Sumbar dan Riau)
5	Kegiatan Koordinasi	3)		50 * 220	APBD Prop. APBD Kab.	464	2)		

Keterangan:

- 1) Informasi besarnya alokasi dana APBN TA 2004 diperoleh ketika peninjauan ke lapangan tanggal 22 s.d 23 Desember 2003
- 2) Belum diperoleh informasi
- 3) Pendanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaannya diluar Consolidated Action Plan

TABEL 2
PENDANAAN PELAKSANAAN ACTION PLAN KOTOPANJANG
KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU

No.	Kegiatan	Realisasi TA 2002		Realisasi TA 2003		Kebutuhan	Perkiraan Alokasi 1)	T A 2004	Keterangan
		Jumlah (juta Rp.)	Sumber Dana	Jumlah (juta Rp.)	Sumber Dana				
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Perkebunan	3)		2,000 6,949	APBN APBD Prop.	9,000	2,000		Pemeliharaan P. IV 5.338 ha dan P. V 1.554 ha
2	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	3)		600 555	APBN APBD Prop.	2)	2)		
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	3)		2,500	APBN	2)	2,500		
4	Pembuatan Drainase Daerah Rawa PIR	3)		960	APBD Prop.	2)	2)		
5	Berbagai kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Kab. Kampar	3)		15.574	APBD Kab.	2)	2)		
6	Berbagai kegiatan yang meliputi: pem-berdayaan masyarakat, usaha pening-katan perekonomian masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana pen-didikan	5,500	APBN APBD Prop.	345					

Keterangan:

- 1) Informasi besarnya alokasi dana APBN TA 2004 diperoleh ketika peninjauan ke lapangan tanggal 18 s.d 19 Desember 2003
- 2) Belum diperoleh Informasi
- 3) Pendanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaannya diluar Consolidated Action Plan

TABEL 3
DAFTAR UNDANGAN RAPAT TIM KOORDINASI KOTOPANJANG
TAHUN 2003

NO	NO SURAT	DARI	KEPADA	PERIHAL	TANGGAL	ACARA
1	050/Bappeda-SDA/2003/007	KA BAPPEDA RIAU	DEP. KIMPRASWIL DEPTAN DEPLAUT&PERIKANAN	RENCANA JANGKA PANJANG CONSOLIDATED ACTION PLAN (CAP) PLTA KOTO PANJANG	8 Jan 2003	Pembahasan rencana jangka panjang CAP Pasca Pembangunan PLTA Kotopanjang Kab. Kampar dengan Tim JBIC-SAPS
2	0268/Dt.7.5/01/2003	Dit. PEPP	PT. PLN Dit. Sappenas Terkait	UNDANGAN RAPAT PLTA KOTOPANJANG	21 Jan 2003	Membahas perkembangan mutakhir penyiapan Environmental Action Plan PLTA Kotopanjang dan rencana tindak lanjutnya
3	0376/Dt.5.5/1/2003	DIT. Pengendalian SDA dan LH		PLTA KOTOPANJANG	28 Jan 2003	Pembahasan Laporan Pendahuluan Mengenal Sedimentasi dan Kualitas Air
4	0579/Dt.7.5/02/2003	DIT. PEPP	PEMDA DEP TEKNIK PT. PLN BAPPENAS	RAPAT PLTA KOTOPANJANG	13 Feb 2003	- Membahas progres pelaksanaan AP 2002 - Membahas persiapan pelak: AP 2003 dan tindak lanjut permasalahan yg dihadapi.
5	0816/D.7/02/2003	DEPLUTI Pendanaan Pedmbangunan	Pemda departemen/Kementerian	RAPAT TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH KOTOPANJANG HEPP	25 Feb 2003	Membahas rencana implementasi CAP dan permasalahan yang dihadapi Prov. Sumbar, Riau dan Dampak Ling.)
6	2333/D.7.5/05/2003	DIT. PEPP	PLN BAPPENAS JBIC	UNDANGAN RAPAT PLTA KOTOPANJANG	21 Mei 2003	Klarifikasi/penjelasan PT. PLN (khususnya mengenai masalah operasional PLTA Kotopanjang dan resettlement)

NO	NO SURAT	DARI	KEPADA	PERIHAL	TANGGAL	ACARA
7	3155/Dt.7.5/07/2003	DIT. PEPP		UNDANGAN RAPAT KOTOPANJANG	4 Juli 2003	Membahas rencana kegiatan Tim Monitoring Post SAPS dan perkembangan pelaksanaan program air bersih di lingkungan PLTA Kotopanjang
8	3425/Dt.7.5/07/2003	DIT. PEPP	PEMUDA DEPARTEMEN BAPPENAS	UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN CAP PLTA KOTOPANJANG HEPP RIAU	21 Juli 2003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CAP TA 2003 Pelaksanaan CAP TA 2003 dan usulan alokasi dana TA 2004
9	3426/Dt.7.5/07/2003	DIT. PEPP	PEMUDA DEPARTEMEN BAPPENAS	UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN CAP PLTA KOTOPANJANG HEPP SUMBAR	21 Juli 2003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CAP TA 2003 Pelaksanaan CAP TA 2003 dan usulan alokasi dana TA 2004
10	3927/Dt.7.5/08/2003	DIT. PEPP		PEMANTAUAN PELAKSANAAN CAP KOTOPANJANG 2003	14 Ags 2003	Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan CAP TA 2003
11	005/587/KD-X/2003	SETDA SUMBAR	DIT. PEPP	UNDANGAN PENANAMAN PERDANA KEBUN KARET PROYEK PLTA PANJANG	1 Okt 2003	
12	5489/Dt.7.5/1/2003	DIT. PEPP	PEMUDA DEPARTEMEN BAPPENAS	RAKOR PELAKSANAAN CAP KOTAPANJANG SUMBAR KABUPATEN 50 KOTA	5 Nop 2003	Memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan CAP Kotopanjang TA 2003
13	0075/Dt.7.5/01/2004	DIT. PEPP	DIT. TERKAIT BAPPENAS SETDITJEN - DEPTAN KETUA BAPPEDA KADIS DLL	UND. KOTOPANJANG	7 Jan 2004	1. Konsolidasi persiapan pelaksanaan Action Plan (AP) 2004 2. Membahas tindak lanjut permasalahan yg dihadapi

TABEL 4
NOTULEN RAPAT KOORDINASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN ACTION PLAN KOTOPANJANG

NO	HARI/TGL	TEMPAT	PIMPINAN RAPAT	ACARA	HASIL RAPAT
1	SENIN, 11 NOP 2002	SG 5, BAPPENAS	1. DIR. PENDANAAN LN MULTILATERAL	1. Pembahasan persiapan pelaksanaan CAP Prov. Sumbar (Kab. 50 Kota) 2. Penjelasan Tim SAPS untuk Phase III	Terlampir
2	SELASA, 12 NOP 2002	SG 4, BAPPENAS	1. DIR. PENDANAAN LN MULTILATERAL	Pembahasan Persiapan Pembentukan CAP untuk Dampak Lingkungan	Terlampir
3	SELASA, 18 PEB 2003	SG 5, BAPPENAS	DIR. PEPP	Pembahasan progress pelaksanaan Action Plan 2002 dan persiapan pelaksanaan Action Plan 2003	Terlampir
4	SENIN, 28 JULI 2003	SG 4, BAPPENAS	1. DEPUTI BID PENDANAAN PEMBANGUNAN 2. DIR. PEPP	1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan CAP TA 2003 (RIAU) 2. Pembahasan rencana CAP TA 2004 (RIAU)	Terlampir
5	SENIN, 28 JULI 2003	SG 4, BAPPENAS	1. DEPUTI BID PENDANAAN PEMBANGUNAN 2. DIR. PEPP	1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan CAP TA 2003 (SUMBAR) 2. Pembahasan rencana CAP TA 2004 SUMBAR	Terlampir

TABEL 5
KUNJUNGAN LAPANGAN TIM KOORDINASI KOTOPANJANG

NO	NO SURAT	DARI	KEPADA	PERIHAL	TANGGAL	ACARA
1	2002/Dt.7.5/04/2003	DIT. PEPP	DINAS TERKAIT	JOINT MISSION DLM RANGKA PLTA KOTOPANJANG DAN KUNJUNGAN PLTA RENUN	29 Apr 2003	Joint Mission JBIC dan GOI dalam rangka Proyek PLTA Renun dan PLTA Kotopanjang
2	452/21/Bappeda-LK/2003	WABUP 50 KOTA	DIR. PEPP	SOSIALISASI KEGIATAN PLTA KOTO PANJANG	21 Mei 2003	Sosialisasi kpd warga masyarakat Tanjung Balit dan Tanjung Pauh
3	3175/Dt.7.5/07/2003	DIT. PEPP	DINAS TERKAIT	JBIC SHORT-TERM POST SAPS MONITORING CONSULTANT UNTUK PLTA KOTOPANJANG	7 Jul 2003	Kunjungan Tim Monitoring Post-SAPS
4	3927/Dt.7.5/08/2003	DIT. PEPP	DINAS TERKAIT	PEMANTAUAN PELAKSANAAN CAP KOTOPANJANG 2003	14 Ags 2003	Kegiatan pemantauan dan evaluasi thd perkembangan pelaksanaan CAP TA 2003 ke lokasi terkena dampak
5	5056/Dt.7.5/10/2003	DIT. PEPP	BAPPEDA SUMBAR BAPPEDA RIAU	MISI MONITORING PEMERINTAH JEPANG DAN JBIC UNTUK KOTOPANJANG HEPP	13 Okt 2003	Kunjungan Pemerintah Jepang dan JBIC Tokyo ke PLTA Kotopanjang
6	6112/Dt.7.5/12/2003	DIT. PEPP	DINAS TERKAIT	PEMANTAUAN PELAKSANAAN CAP KOTAPANJANG PROV. SUMBAR KAB. 50 KOTA	17 Des 2003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CAP 2003 di Kab. 50 Kota Prov. Sumbar
7	6113/Dt.7.5/12/2003	DIT. PEPP	DINAS TERKAIT	PEMANTAUAN PELAKSANAAN CAP KOTAPANJANG PROV. RIAU KAB. KAMPAR	17 Des 2003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CAP 2003 di Kab. Kampar Prov. Riau

TABEL 6
**DAFTAR SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN ALOKASI DANA UNTUK PELAKSANAAN ACTION PLAN KOTOPANJANG
 TA 2002, 2003 DAN 2004**

NO	NO SURAT	DARI	KEPADA	PERIHAL	TANGGAL	KETERANGAN
1	5832/D.V/12/2001	DEPUTI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA LN	SEKJEN DEPHUT	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN KEG. REBOISASI DAN KONSERVASI DI DAERAH PLTA KOTAPANJANG	24 Des 2001	Pertunya dukungan alokasi dana pembiayaan kegiatan reboisasi dan konservasi satwa liar pada TA 2002
2	5811/D.V/12/2001	DEPUTI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA LN	SEKJEN DEPKELAUTAN DAN PERIKANAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN PERMASALAHAN DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA PEMB. PLTA KOTAPANJANG	14 Des 2001	Pertunya dukungan alokasi dana pembiayaan kegiatan perikanan rakyat pada TA 2002
3	5833/D.V/12/2001	DEPUTI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA LN	SEKJEN DEPTAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN PERMASALAHAN DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA PEMB. PLTA KOTAPANJANG	24 Des 2001	Pertunya dukungan alokasi dana pembiayaan kegiatan perkebunan karet dan peternakan rakyat TA 2002
4	5403/D/7/11/2002	Pt. DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	SEKJEN DEP. KIMPRASWIL	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA PEMB. PLTA KOTAPANJANG (50 KOTA)	11 Nop 2002	Pertunya dukungan alokasi dana pembangunan, rehabilitasi prasarana air bersih dan jalan kebun resetlement untuk dialokasikan TA 2003
5	5404/D/7/11/2002	Pt. DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	SEKJEN DEPTAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA PEMB. PLTA KOTAPANJANG (50 KOTA)	11 Nop 2002	Pertunya dukungan alokasi dana keg. Perkebunan karet dan peternakan TA 2003
6	5869/D/7.5/12/2002	DIR. PEPP	DIR. PERKOT. DAN PERDESAAN DEP KIMPRASWIL	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA PEMB. PLTA KOTAPANJANG	4 Des 2002	Konfirmasi mengenai alokasi pembiayaan keg. diatas sebagaimana no surat 5403/D/7/11/2002
7	5870/D/7.5/12/2002	DIR. PEPP	SETDITJEN BINA PRODUKSI PETERNAKAN DEPTAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA PEMB. PLTA KOTAPANJANG	4 Des 2002	Konfirmasi mengenai alokasi pembiayaan keg. diatas sebagaimana no surat 5404/D/7/11/2002

NO	NO SURAT	DARI	KEPADA	PERIHAL	TANGGAL	KETERANGAN
8	5868/D.7.5/12/2002	DIR. PEPP	SETDIJEN BINA PRODUKSI PERKEBUNAN DEPTAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA PEMB. PLTA KOTOPANJANG	4 Des 2002	Konfirmasi mengenai alokasi pembiayaan keg. diatas sebagaimana no surat 5404/D/7/11/2002
9	5575/D.7/11/2002	PLT. DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	GUBERNUR PROV. SUMBAR	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN PENANGANAN DAMPAK DI DAERAH RESETTLEMENT PASCA PEMB. PLTA KOTOPANJANG	19 Nop 2002	Perlu nya dukungan alokasi dana pembangunan/ rehabilitasi prasarana air bersih sebesar Rp. 4,77 miliar TA 2003
10	3379/D.L.7.5/07/2003	DIR. PEPP	KETUA BAPPEDA PROV. SUMBAR KETUA BAPPEDA KAB. 50 KOTA	RENCANA KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN CAP TA 2004	17 Juli 2003	Meminta membahas rencana kegiatan beserta sumber pendanaan CAP Kotapanjang TA 2004
11	3380/D.L.7.5/07/2003	DIR. PEPP	KETUA BAPPEDA PROV. RIAU KETUA BAPPEDA KAB. KAMPAR	RENCANA KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN CAP TA 2004	17 Juli 2003	Meminta membahas rencana kegiatan beserta sumber pendanaan CAP Kotapanjang TA 2004
12	5711/D/7/11/2003	DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	SEKJEN DEPTAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN UNTUK KOTOPANJANG (RIAU)	17 Nop 2003	Perlu nya kesinambungan pembangunan/ rehabilitasi kebun karet di daerah resettlement untuk dialokasikan pada TA 2004
13	5712/D/7/11/2003	DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	SEKJEN DEPTAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN UNTUK KOTOPANJANG (SUMBAR)	17 Nop 2003	Perlu nya kesinambungan pembangunan/ rehabilitasi kebun karet di daerah resettlement untuk dialokasikan pada TA 2004
14	5713/D/7/11/2003	DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	SEKJEN DEP. KELAUTAN & PERIKANAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN UNTUK KOTOPANJANG (SUMBAR)	17 Nop 2003	Perlu nya kesinambungan pembangunan usaha perikanan di daerah resettlement untuk dialokasikan pada TA 2004
15	5714/D/7/11/2003	DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	SEKJEN DEP. KIMPRASWIL	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN UNTUK KOTOPANJANG (SUMBAR)	17 Nop 2003	Perlu nya kesinambungan pembangunan/ rehabilitasi prasarana air bersih di daerah resettlement untuk dialokasikan TA 2004
16	5715/D/7/11/2003	DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	SEKJEN DEP. KELAUTAN & PERIKANAN	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN UNTUK KOTOPANJANG (RIAU)	17 Nop 2003	Perlu nya kesinambungan pembangunan usaha perikanan di daerah resettlement untuk dialokasikan pada TA 2004
17	5716/D/7/11/2003	DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	SEKJEN DEP. KIMPRASWIL	DUKUNGAN ALOKASI PEMBIAYAAN UNTUK KOTOPANJANG (RIAU)	17 Nop 2003	Perlu nya kesinambungan pembangunan/ rehabilitasi prasarana air bersih di daerah resettlement untuk dialokasikan TA 2004

TABEL 7
DAFTAR SURAT MENINGGATKAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA
KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
ACTION PLAN PROYEK KOTOPANJANG

NO	NO SURAT	DARI	KEPADA	PERIHAL	TANGGAL	KETERANGAN
1	5835/D.7/12/2002	Pt. DEPUTI BID. PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAPPEDA PROPINSI SUMATERA BARAT	PELAKSANAAN KEGIATAN ACTION PLAN DI DESA T.J. BALIT DAN DESA T.J. PAUH	3 Des 2002	Kegiatan nyata tahun 2002 belum dilaksanakan dan kepala desa serta masyarakat belum mengetahui rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan
2	0089/DL.7.5/01/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAPPEDA PROPINSI RIAU	CONSOLIDATED ACTION PLAN PLTA KOTAPANJANG RIAU	8 Jan 2003	Saran pertunya keterlibatan instansi terkait di tingkat pusat untuk konfirmasi kegiatan dan alokasi pembayaannya
3	0704/DL.7.5/02/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA KANTOR BPN 50 KOTA	KLARIFIKASI KEPEMILIKAN KEBUN	19 Feb 2003	Klarifikasi data kepemilikan kebun (luas kebun jumlah PAFs)
4	0706/DL.7.5/02/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA DINAS PETERNAKAN PROP. SUMATERA BARAT	PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ACTION PLAN DI DESA T.J. BALIT DAN T.J. PAUH	20 Feb 2003	Untuk melakukan exercise pendahuluan dengan Bappeda Prop. Sumatera Barat mengenai rencana pendanaan TA 2003
5	0707/DL.7.5/02/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROP. SUMATERA BARAT	PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ACTION PLAN DI DESA T.J. BALIT DAN T.J. PAUH	20 Feb 2003	Untuk melakukan exercise pendahuluan dengan Bappeda Prop. Sumatera Barat mengenai rencana pendanaan TA 2003
6	0708/DL.7.5/02/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROPINSI SUMATERA BARAT	PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ACTION PLAN DI DESA T.J. BALIT DAN T.J. PAUH	20 Feb 2003	Untuk melakukan exercise pendahuluan dengan Bappeda Prop. Sumatera Barat mengenai rencana pendanaan TA 2003

NO	NO SURAT	DARI	KEPADA	PERIHAL	TANGGAL	KETERANGAN
7	1279/DL.7.5/03/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAPPEDA PROPINSI SUMATERA BARAT	JADWAL PELAKSANAAN ACTION PLAN 2003 UNTUK DAMPAK PLTA KOTAPANJANG	21 Mar 2003	Penyempurnaan Draft jadwal pelaksanaan action plan TA 2003
8	1280/DL.7.5/03/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAPPEDA PROPINSI RIAU	JADWAL PELAKSANAAN ACTION PLAN 2003 UNTUK DAMPAK PLTA KOTAPANJANG	21 Mar 2003	Penyempurnaan Draft jadwal pelaksanaan action plan TA 2003
9	1771/DL.7.5/04/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAPPEDA PROPINSI RIAU	JADWAL PELAKSANAAN ACTION PLAN 2003 UNTUK DAMPAK PLTA KOTAPANJANG	16 Apr 2003	Upaya-upaya khusus untuk percepatan finalisasi jadwal pelaksanaan CAP 2003
10	1772/DL.7.5/04/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAPPEDA PROPINSI SUMATERA BARAT	JADWAL PELAKSANAAN ACTION PLAN 2003 UNTUK DAMPAK PLTA KOTAPANJANG	16 Apr 2003	Upaya-upaya khusus untuk percepatan finalisasi jadwal pelaksanaan CAP 2003
11	3953/DL.7.5/08/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAPPEDA PROPINSI RIAU	CONSOLIDATED ACTION PLAN KOTAPANJANG	15 Agt 2003	Mohon kerjasama dalam mengkoordinasikan penyelesaian CAP jangka panjang untuk Kotapanjang
12	3954/DL.7.5/08/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA DINAS PETERNAKAN PROP. SUMATERA BARAT	PROGRAM USAHA PETERNAKAN DALAM RANGKA KOTAPANJANG	15 Agt 2003	Penyelesaian dan koordinasi dengan PAFs mengenai pola bantuan peternakan
13	3955/DL.7.5/08/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA DINAS PERIKANAN PROP. SUMATERA BARAT	PROGRAM USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA KOTAPANJANG	15 Agt 2003	Konfirmasi pelaksanaan kegiatan usaha perikanan TA 2003 di wilayah waduk Kotapanjang
14	3956/DL.7.5/08/2003	DIR. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA DINAS PERIKANAN PROPINSI RIAU	PROGRAM USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA KOTAPANJANG	15 Agt 2003	Koordinasi penyelesaian permasalahan usaha keramba ikan dan permasalahan jenis ikan yang ditebarakan ke dalam waduk Kotapanjang

NO	NO SURAT	DARI	KEPADA	PERIHAL	TANGGAL	KETERANGAN
15	4115/Dt.6.3/8/2003	DIREKTUR PERUMUKIMAN DAN PERUMAHAN	DIR. PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH BARAT DEP. KIMPRASWIL	PENANGANAN DAMPAK PEMBANGUNAN PLTA KOTAPANJANG	26 Agt 2003	Hasil kunjungan lapangan dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan penanganan dampak pembangunan PLTA Kotapantjang
16	4129/Dt.5.1/08/2003	DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN	SEKDJEN BINA PRODUKSI PETERNAKAN DEP. PERTANIAN	PROGRAM USAHA PETERNAKAN DALAM RANGKA KOTAPANJANG	27 Agt 2003	Saran solusi penyelesaian permasalahan dalam surat 3954/Dt.7.5/08/2003
17	4677/D.7/09/2003	DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	GUBERNUR PROPINSI SUMBAR	ACTION PLAN KOTAPANJANG	24 Sep 2003	Hasil pemantauan Tim Teknis ke lapangan pada tanggal 20-22 Agustus 2003 terhadap perkembangan pelaksanaan CAP
18	4678/D.7/09/2003	DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	GUBERNUR PROPINSI RIAU BUPATI KAB. KAMPAR	ACTION PLAN KOTAPANJANG	24 Sep 2003	Hasil pemantauan Tim Teknis ke lapangan pada tanggal 27-28 Agustus 2003 terhadap perkembangan pelaksanaan CAP

III. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Dalam pelaksanaan action plan Kotapanjang, ditemukan beberapa kendala dan upaya pemecahannya sebagai berikut:

i. Sumatera Barat

1. Mekanisme pendanaan untuk pelaksanaan consolidated action plan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat sebagian besar (92 %) dialokasikan melalui dana APBN dekonsentrasi. Namun demikian, dijumpai permasalahan dalam pengkoordinasian pelaksanaan antara dinas-dinas sektor di tingkat Propinsi yang bertindak sebagai pelaksana dengan Pemerintah Kabupaten 50 Kota.

Pada tanggal 17 Juli dan 7 Desember 2003, Bupati 50 Kota mengajukan surat permohonan kepada Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah untuk dukungan alokasi pembiayaan consolidated action plan 2004-2008 serta kemungkinan pelaksanaannya secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten 50 Kota (copy surat dan tanggapan Gubernur Sumatera Barat atas surat dimaksud terlampir, Lampiran 11).

Lemahnya koordinasi antara dinas terkait tingkat Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten telah mempengaruhi kelancaran pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat terkena dampak serta mobilisasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan kebun karet, peternakan, maupun air bersih.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah meminta Gubernur dan Bupati untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait tingkat Propinsi dan Kabupaten dengan melibatkan lebih banyak peran dinas-dinas Kabupaten didalam pengelolaan proyek maupun pelaksanaannya di lapangan.

2. Belum optimalnya fungsi Komite Pengawasan dan Evaluasi (KPE) Kabupaten 50 Kota, mengakibatkan masih banyaknya informasi yang tidak akurat diterima oleh masyarakat sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. Guna memacu fungsi KPE, Tim Teknis mengadakan peninjauan secara berkala ke lapangan dan mengikuti secara langsung pertemuan atau dialog yang diselenggarakan oleh KPE. Tim juga menyarankan agar KPE dapat lebih proaktif dalam mengikuti perkembangan pelaksanaan dan validisasi informasinya.
3. Pusat Informasi (Information Cell) yang direncanakan dapat efektif September 2003 ternyata belum terealisasi. Hal ini mengakibatkan semakin kurangnya perolehan informasi yang akurat oleh masyarakat terkena dampak mengenai rencana (kegiatan, biaya dan jadwal) pelaksanaan dan perkembangannya mengenai penanganan dampak (sebagaimana consolidated action plan yang telah disepakati). Upaya yang akan dilaksanakan Tim (Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan Bappenas selaku Sekretariat Tim Teknis) adalah melalui penyediaan informasi melalui web-site yang direncanakan pada TA 2004.

i. Riau

1. Pendekatan penanganan yang diarahkan oleh DPRD Propinsi Riau maupun Kabupaten Kampar berbeda dengan yang dilakukan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dimana penanganan dampak tidak direncanakan dan dilaksanakan secara khusus, melainkan secara reguler. Hal ini mengakibatkan penanganan secara komprehensif sulit dilaksanakan.

Dengan kata lain, tidak adanya jaminan dukungan pendanaan oleh Pemerintah setempat mengakibatkan kebutuhan maupun dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat meningkat. Misalnya, dalam penanganan air bersih di 14 desa terkena dampak yang diperkirakan memerlukan dana sebesar Rp. 30 miliar, sedangkan alokasi dana APBN pertahun hanya sekitar Rp. 2.5 miliar. Sehingga untuk menyelesaikan penanganan air bersih tersebut, memerlukan waktu lebih dari 10 tahun.

Hingga saat ini, masalah pendanaan tersebut belum diperoleh pemecahannya mengingat belum adanya alternatif sumber pembiayaan lainnya.

2. Proses penyusunan penanganan dampak yang dilakukan di Kabupaten Kampar baru dalam tahap "identifikasi kebutuhan" untuk setiap desa yang terkena dampak yang telah ditandatangani dalam Berita Acara oleh seluruh kepala desa. Mengingat adanya keterbatasan pendanaan, perlu dilakukan penyusunan skala prioritas terhadap identifikasi kebutuhan tersebut yang dituangkan lebih lanjut dalam jumlah dana yang dibutuhkan.
3. Belum terselesaikannya masalah pendanaan dan skala prioritas tersebut di atas yang akan digunakan sebagai acuan berbagai instansi yang terkait (action plan secara komprehensif) mengakibatkan hambatan dalam koordinasi dan pemantauan perkembangannya.
4. Kurangnya koordinasi penanganan dampak lingkungan di Kabupaten Kampar dan antar instansi yang terkait dengan dampak lingkungan hidup dapat berpotensi memperburuk kondisi lingkungan setempat, seperti penebangan hutan, penambangan batu secara liar di sekitar PLTA, perkembangan pembangunan keramba apung serta penanganan satwa liar yang masih tertunda. Direktorat terkait Bappenas telah mengupayakan pengkoordinasian penanganan yang dituangkan dalam "integrated action plan dampak lingkungan" (lampiran - 12).
5. Pengelolaan dan penggunaan waduk Kotapanjang belum dilakukan secara terpadu antar Kabupaten 50 Kota, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Diperlukan segera adanya penyusunan tata ruang waduk Kotapanjang yang mengatur zonasi peruntukan serta perizinannya, meskipun pada saat ini belum ada instansi yang jelas guna perkoordinasian masalah tersebut.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Penanganan dampak Kotapanjang melalui consolidated action plan telah dilaksanakan sejak TA 2002, namun koordinasi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan terutama dalam sharing pendanaan antar instansi pusat dan daerah. Selain itu, perlu pula ditekankan pentingnya pergeseran porsi pendanaan serta tanggung jawab pelaksanaan ke pihak Pemerintah Daerah mengingat pemanfaat utama penanganan dampak pada khususnya adalah masyarakat setempat, sehingga dapat menumbuhkan "ownerships" guna keberlanjutan pembangunan melalui kegiatan penanganan dampak dimaksud.
2. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penanganan dampak secara tuntas bersifat mengikat baik kepada pihak Pemerintah Jepang dan JBIC (sebagai pemberi pinjaman) dan masyarakat terkena dampak, sehingga harus dilanjutkan sebagaimana consolidated action plan untuk Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat yang disepakati; dan rencana penanganan dampak yang dilakukan secara reguler oleh Pemerintah Propinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Dalam hal ini, peranan Tim Koordinasi sangat vital guna memantau dan memastikan komitmen dimaksud berjalan secara konsisten.
3. Gagasan mengenai perubahan mekanisme pengalokasian dana APBN dari skema dekonsentrasi menjadi "perbantuan langsung" ke Pemerintah Kabupaten 50 Kota untuk sisa pelaksanaan hingga 2008 perlu ditinjau kembali. Hal ini mengingat prosedur dan pengelolaan anggaran yang bersifat "perbantuan langsung" merupakan otorisasi DPRD setempat, sehingga berpotensi terjadinya pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan rencana.
4. Keanggotaan Tim sebagaimana dimuat dalam SK MENPPN/Kepala Bappenas No. KEP. 264/MENPPN/05/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Perkembangan Pelaksanaan Action Plan Proyek Kotapanjang tanggal 31 Mei 2002, memerlukan penyempurnaan atau revisi mengingat permasalahan yang berkembang misalnya penanganan dampak lingkungan dan koordinasi dalam penyusunan tata ruang penggunaan waduk Kotapanjang; dan adanya reorganisasi pada beberapa instansi terkait.
5. Diperlukan penanganan secara khusus mengenai tata ruang penggunaan waduk mengingat lokasi waduk yang terletak di wilayah Kabupaten 50 Kota, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Pada saat diharapkan adanya inisiatif Pemerintah tersebut di atas untuk menyusun konsep peraturan daerah secara terpadu, sambil menunggu kepastian keberadaan Tim Tata Ruang Penggunaan Waduk yang dalam waktu dekat direncanakan akan berada dibawah koordinasi Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas.
6. Dengan adanya keterbatasan dana dari APBN, APBD Propinsi Riau dan Kabupaten Kampar, maka diperlukan percepatan pelaksanaan penanganan dampak dengan mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lainnya, seperti pinjaman dan hibah luar negeri.
7. Perlu upaya percepatan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tentang gugatan PAFs atas ganti rugi lahan.

コタパンジャン「行動計画」の実施のための
進捗モニタリング調整チーム

2003年実施報告書

国家開発企画庁(BAPPENAS)
インドネシア共和国

I 序言

コタパンジャン水力発電(PLTA)プロジェクトの建設は、1992年10月から1997年11月にかけて行われた。このプロジェクトの総経費は、298億9000万円にのぼった。このうちには、国際協力銀行(JBIC)の借款契約IP-358号とIP-374号を通じて供与された譲許的な円借款228億1000万円が含まれていた¹⁾。

このPLTAプロジェクトは、カンバル・カナン川を堰き止め、124平方キロメートルの広さの土地——リアウ州カンバル県8ヵ村²⁾と西スマトラ州リマプル・コタ県の2ヵ村——を水没させた。その上、4,886世帯を移転/再定住させた——カンバル県では、1992～1996年の期間に4,152世帯が移転し、リマプル・コタ県では、1993年に734世帯の移転が完了した——。

本プロジェクトは、以下のような調査結果に基づいて実施された。即ち、「実行可能性」調査(1982～84年にJICAによって実施)、「環境影響分析」調査(1983年にアンダラス大学によって実施)、「詳細設計」(1987～88年)、「環境管理計画」(RKL)と「環境モニタリング計画」(RPL)(1988年に東電設計とリアウ大学によって作成)などの調査結果である。

PLTAの商業運転は、114メガワットの規模の電力生産およびコタパンジャン～プカンバル送電線網(150キロボルト、70キロメートル)とパヤクンプ～コタパンジャン送電線網(150キロボルト、83キロメートル)への接続の目的で、1998年1月に開始された。このPLTAの設置の便益としては、とりわけ外貨節約、ダム貯水池の下流地域の洪水防止、および地域経済の発展の促進が挙げられた。

しかしながら、コタパンジャンPLTAプロジェクトの建設によって影響を受けた住民(PAF, Project Affected Family)の側からの提訴問題が発生した。この提訴は、インドネシア政府によって未だに適正な補償がなされていないことと、現地の非政府団体(LSM)の活動に関している。この提訴は、日本のLSMによって支援されている。この提訴問題の「核心的なポイント」となっているのは、とりわけ日本政府は、コタパンジャンPLTAプロジェクトへの借款の供与者として、このプロジェクトの建設においてインドネシア政府と共謀関係にあるという点である。

現在までのところ、この問題への対処策の進捗度に対しては、インドネシア政府によって真剣な関心が払われてきており、また日本政府側との二国間会議での討議議題ともなっている。

コタパンジャンPLTAプロジェクトの建設後において発生している幾つかの社会的・環境的影響は、以下の通りである。

A リアウ州カンバル県

1. 1991～96年の期間に実施された6,892ヘクタールの面積のゴム農園の造成は、失敗に帰してしまっただ。なぜなら、枯れ死率が高かった(85%)からである。この問題は、植え付けの実施時期の遅れ——整地作業に手間取ったため——、枯れ死状態の苗木の配布、および農民の側での手入れ不足の結果として発生した。

2. コタパンジャンPLTAプロジェクト、「集団移住計画」プロジェクト、および貧困層のためのインフラストラクチャー・プロジェクト(P3DT)を通じて建設された清潔な水供給施設(井戸、電動式揚水

(1) 1990年12月12日に署名された借款契約IP-358号により125億円、および1991年9月25日に署名された借款契約IP-374号により175億円の借款額の供与が約束された。ただし、実際に供与されたのは、総額228億1000万円であった。一方、インドネシア政府の負担分は、70億8000万円相当額であった。これらの資金は、国家予算(APBNとAPBD)および国有電力会社(P.T. PLN)を通じて負担された。

(2) リアウ州のカンバル県8ヵ村は、現在、14ヵ村になっている。そのため、このプロジェクトによって影響を受けた村落は、(西スマトラ州リマプル・コタ県の2ヵ村を含めて)、全部で16ヵ村である。

ポンプおよび給水設備)は、最大限に機能しておらず、また地下水の状態と水質も、飲料用には不適切である。

3. 生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)および硫化水素(H₂S)の含有量が高いことから、ダム貯水池の水質は低下してきている。

4. 土砂堆積の数値が高い。および、

5. ダム・サイト周辺の野生動物 — およそ30～40頭のスマトラ象とスマトラ虎が生息していたものと推測される — の生息地とムアラ・タクス文化保護区が失われた。

B 西スマトラ州リマプル・コタ県

1. このプロジェクトにより影響を受けた住民の一部に対しては、彼等によって要求されている補償金は、未だに十分に支払われていない。この問題が発生したのは、代替地として供与された土地面積が、住民要求と釣り合いなため、また住民要求と比べて、補償額が余りにも低すぎるためである。リマプル・コタ県の67世帯(タンジュン・パウ村住民)と10世帯(タンジュン・バリット村住民)が、現地と日本のNGOの支援を得て、タンジュン・パティの地方裁判所を通じて訴訟を提起した。地方裁判所の判決は、タンジュン・バリット村住民の請求については、1999年2月10日に下され、またタンジュン・パウ村住民の請求については、2001年3月8日に下された。その後、住民請求は、2002年1月16日にバダンの高等裁判所の判決によって強められ、タンジュン・パウ村の10世帯の請求が勝訴判決を得た。しかしながら、この判決は、原告住民によって受け入れられなかった。その結果、住民は、最高裁判所に対して、高裁判決の却下を求めて上訴した。今日までの情報では、最高裁判所による判決は、未だに下されていない。

2. 1991～96年の期間に実施されたゴム農園の造成は、失敗に終わってしまった。その理由は、ゴム樹が育たず、(約85%が)枯れ死してしまったからである。この問題は、植え付けの実施時期の遅れ — 整地の遅れ — 、枯れ死状態の苗木の配布、および農民の側での手入れ不足の結果として発生した。

3. 2002年9月5日に、17名のPAFs代表が、現地の弁護士とNGO、および「インドネシア環境フォーラム」(WALHI)代表によって支援されて、キャンペーン活動のために日本を訪問するとともに、日本政府、JBIC、JICAおよび東電設計を相手取って東京地方裁判所に提訴した。幾つかの請求事項のうちでも、特に盛り込まれたのは、日本政府からの「謝罪」の表明の要求、一人当たり500万円の損害賠償、およびPLTAコタパンジャンの閉鎖であった。JBICジャカルタ事務所を通じて得られた情報によると、東京地方裁判所でのこの問題についての審理過程は、依然として継続中であるとのことである。

4. PLTAプロジェクト、「集団移住計画」プロジェクト、および貧困層のためのインフラストラクチャー・プロジェクト(P3DT)を通じて建設された清潔な水供給施設(井戸、電動式揚水ポンプおよび給水設備)は、今日、機能していない。現地訪問によって得られた情報と調査結果によると、PAFsは、生活難に陥っているために、これらの施設の運行と維持のための経費を賄い切れないとのことである。2001年には、日本からの一人の大学生が、タンジュン・パウ村での実習作業を行っている際に、清潔な水ポンプと設備を個人的に建設した。その時点では、この施設は、同地のPAFsによって非常に重用された。しかしながら、この施設は、現在では、もはや機能していない。

情報相/BAPPENAS長官による2002年5月31日付の政令KEP.264/MENPPN/05/2002のうちにおいて、コタパンジャン・プロジェクトの「行動計画」の実施のモニタリングのための調整チームに関して記載され

ており(付属書1を参照)、また2001年12月7日付のインドネシア政府と日本政府との間の覚書(MOD)においては、BAPPENASの役割に関して記載されている(付属書2を参照)。その理由は、コタパンジャン「行動計画」の実施の調整のためには、「調整チーム」(特別タスク・フォース)の設立が必要であるためである。このチームの目的は、コタパンジャンに関する一連の問題に対処するための措置の実現を支援し、またその解決策の進展をモニタリングすることである。

このチームの存在と役割は、「行動計画」(対策)の準備/策定、資金調達を調整する上で、さらにコタパンジャン問題の処理の実施において配慮を払う上で、非常に重要である。このチームは、農業省(牧畜、農園、および農道)、居住環境省(清潔な水、道路、および橋梁)、海洋漁業省(養殖)、森林省(森林の保護と自然の保全)、自然環境省、国有電力会社(P.T. PLN)などの種々の関連機関にまたがる部門横断的な形態の組織である。さらに、これは、リアウ州カンパル県政府と西スマトラ州リマプル・コタ県政府の関連機関を地域的にまたがる横断的組織でもある(付属書3を参照)。

前記の機能のほかに、「調整チーム」はまた、調査活動の実施の推進役という役割も演ずる。2002年2月から2003年3月までの期間、「援助効果促進業務」(SAPS)チームを通じて、JBICによる贈与資金援助の下での調査を実施した。また、2003年7月から2004年3月までの期間、JBIC支援のポストSAPS長期モニタリングを実施した。当該チームはまた、インドネシア政府が、「行動計画」の具体策を策定するのを支援する任務、さらに現地での「行動計画」の実施を直接的に支援する任務も遂行している(付属書4を参照)。

II コタパンジャン・プロジェクトの影響緩和措置の実施

コタパンジャンPLTAプロジェクトの建設による影響緩和措置は、すでにこのプロジェクトの建設の開始(1992年)以来実施されてきている。しかしながら、かかる影響緩和措置は、適正に実施されてきておらず、当初に計画されたような成果をもたらしてきていない。

このように適正に実施されてきていない措置のうちには、土地補償の未解決、つまり補償金の未払い、ゴム農園の造成の失敗、清潔な水施設の不備などが含まれる。その結果として「失われた」のは、PAFsの側での政府に対する信用である。

インドネシア政府と日本政府(JBIC)との間で合意された覚書(MOD)のうちでは、前記の影響に対処するための方策が必要であることについての規定が盛り込まれ、一つの行動計画(action plan)を策定し、2002年にこの計画を開始することが定められた。

しかしながら、すでに策定されていた「行動計画」の提案は、2002年にアンダラス大学とリアウ大学によって実施された総合的調査 — 前者は西スマトラ州、後者はリアウ州について調査を実施 — に基づいて、いま一度強化する必要があることが合意された。このような問題が生じたのは、「行動計画」の受け入れを容易にするためには、この計画の策定のうちにPAFsの要望と参加を反映させる必要があるとの考慮からであった。しかしながら、政府関係機関の資金調達力と人的能力の限界に配慮して、「行動計画」は、段階的に策定および実施されることとなった。

土地補償の問題に特に関係するのは、手続面または法律面で講じられる解決策としての決定は、今後発生する問題処理の悪い先例とならないように取り扱われなければならないという点である。

コタパンジャン・プロジェクトの影響に関しての対処措置については、以下において、これを詳述してみることにする。

A 「統合行動計画」の策定以前の影響緩和措置

コタパンジャンPLTAプロジェクトの影響を緩和するための方策としては、当該プロジェクトの建設開始以来、2001年までの時点(「統合行動計画」の策定以前)においては、以下のような措置が講じられた。

1. リアウ州カンパル県

① 1999年3月までに、村人たちによって所有されていた総面積2万3,156.7ヘクタール(2万1,497区画)の土地が水没し、これに対する償いとして総額589億ルピアの補償金が支払われた。

② 4,152世帯の住民の移転と再定住が、すでに完了した。このうち、3,446世帯は、全村移転方式(pola bedol desa)の下で、また706世帯は、「中核農園プログラム」(PIR)移転方式の下で移住した。各々の世帯に対しては、1ユニットの簡素な住宅、0.75ヘクタールの食糧生産地、0.25ヘクタールの庭地、2ヘクタールの農園用地が供与された。

③ 3,446世帯のためのゴム農園の造成は、1991/92~1995/96年の期間に実施されたのであるが、この植樹は成功しなかった。その原因は、ゴム樹の85%が枯れ死してしまったためである。1999/2000年以降には、6,892ヘクタールの面積においてゴム樹の再植え付けが行われ、農園の手入れ経費として399億ルピアが供与された。

④ 706世帯のためのアブラ・ヤシ農園の造成は、すでに完了した。農園の80%においては、非常に

満足的な収穫を得る段階にまで達しているのであるが、20%においては、満足的な状態とはほど遠い。

⑤ 1998/99～2001年度においては、庭地において、ミカン栽培を促進することにより、また家禽類の飼育を促進することにより、収入増を図ることに集中した措置が講じられた。

⑥ 1998/99～2001年度には、養殖漁業(ニラとグラメ)を促進するプログラムが実施された。また、小規模な魚加工工場も建設された。

⑦ 1998/99～2001年度には、道路(C級)、橋梁、コンクリート溝、暗渠水道の建設/補強が実施された。

2. 西スマトラ州リマプル・コタ県

① 1993/94年度には、(旧)タンジュン・パウ村と(旧)タンジュン・バリット村の住民約800世帯が、リンボ・ダタ(Rimbo Datar)移住地に移転した。この移転に合わせて、移住地でのインフラ整備(道路と清潔な水施設)も行われた。各々の世帯に対しては、1ユニットの簡素な住宅、0.5ヘクタールの庭地、2ヘクタールの農園地が与えられた。

② 1994/95年度には、リマプル・コタ県の1,508ヘクタールの面積のゴム農園において、苗木の植え付けが実施された。1999/2000年度においては、西スマトラ州政府は、整地(5,000ヘクタール)を行い、再植樹(3,500ヘクタール)を行い、さらに2001年度には追加植樹(5,338ヘクタール)を行った。しかしながら、これらのゴム樹は、火災の発生で焼失してしまった。

③ 1999/2000年度には、9ユニットの清潔な水施設(井戸設備)のリハビリ工事が実施された。しかしながら、これらの施設は、依然としてPAFsによって使用され得るような状態ではない。

B 「統合行動計画」を通じての影響緩和措置

コタバンジャン・プロジェクトの影響緩和措置の実施のために、インドネシア政府が約束しているのは、「行動計画」(action plan)の策定および実施を通じて、PAFsの直接的な参加を図る方法で、対処方策を実施するというのである。この点は、「統合行動計画」において表明されている。

1. 西スマトラ州リマプル・コタ県

「西スマトラ州統合行動計画」(2002～2008年)は、すべての関係者の参加の下に開かれたワークショップ(2002年7月27日)を通じて、すでに策定された。この計画では、優先プログラムのために、総額で612億ルピアの経費が計上された。ただし、このプログラムのうちには、後日に検討される必要のある項目も含まれている(付属書5を参照)。

2002年度に実施された活動のための総経費は、17億700万ルピアであった。その詳細は、以下の通りである。

① タンジュン・バリット村とタンジュン・パウ村のゴム農園地の境界を再測量するための活動が行われた。水没影響を受けた孤立地域の測量およびウラヤット地(tanah ulayat)の境界の測量と土地証明書の作成のために、2億ルピアの資金(西スマトラ州の APBD 資金)と1億1,400万ルピアの資金(リマプル・コタ県の APBD 資金)が割り当てられた。

② ゴム農園の造成計画における社会化活動と農民候補者の選定のために、3億4,300万ルピアの資金(分権化資金を通じての APBN 資金)が支出された。

③ 移転住民の経済生活再建プログラム(PEMP)を通じて、ダム貯水池での養殖漁業の促進のために、9億5,000万ルピアの資金(分権化資金を通じての APBN 資金)が割り当てられた。

④ 清潔な水施設のための詳細設計の調査費として、1億ルピアの資金(西スマトラ州の APBD 資金)が

支出された。

2003年度に実施された活動のためには、総額で137億8,000万ルピアの経費が投入された。その詳細は、以下の通りである。

① 700ヘクタールの面積(総面積は、1,600ヘクタール)のゴム農園の造成と長さ20キロメートルの農園道路の建設のために、61億2,000万ルピアの資金が支出された。

② 清潔な水施設、橋梁および環状道路の建設のために、63億7,471万ルピアの資金が支出された。

③ 家畜飼育事業の促進のために、8億3,000万ルピアの資金が支出された。この資金は、186頭(1世帯当たり1頭)の肉牛の分配経費に充てられた。

④ 養殖事業の促進のために、3,670万ルピアの資金が支出された。この資金は、6万匹のニラ魚の稚魚(5~8センチ)の放流、水関連技術者の指導、放流地域での現地候補者の確定の経費に充てられた。

西スマトラ州リマプル・コタ県での「統合行動計画」の実施資金に関する詳細は、表1のうちに掲げられている。

2. リアウ州カンバル県

リアウ州とカンバル県のいずれにおいても、コタパンジャン問題への対策経費は、地方議会(DPRD)資金によって支出されるという政策が採られている。つまり、2004年以降におけるカンバル県でのこの問題への対処の仕方を眺めてみると、西スマトラ州リマプル・コタ県におけるように、特別の方法で対処策を講じるというのとは類似しておらず、それとは異なっている。むしろ、対処措置は、通常の建設プログラムを通じて実施されてきている。

そのため、「行動計画」の実施は、「開発戦略計画」(Renstra 2004~2008)および「地域建設プログラム」(Propeda)と一体化して進められている。一方、リアウ州カンバル県における2003年度の影響緩和計画は、付属書6において掲げられている。

2002年度において実施された影響緩和活動のためには、総額で58億4,500万ルピアの経費が投入された。その詳細は、以下の通りである。

① 家内工業の活動事業の促進、ミカンとゴム樹の手入れ、鶏と肉牛の飼育、養殖向け種苗栽培事業の促進、灌漑建設、小規模事業の育成(事業資金の援助)、環状道路の建設と補修、30ユニットの小学校(および、その他の教育施設)の建設などのプログラムに対して、リアウ州のAPBD資金を通じて、55億ルピアが支出された。

② 住民直接援助(BLM)方式の下で実施されている養鶏分野でのアグリビジネスの促進のために、分権化資金を通じてAPBN資金3億4,500万ルピアが割り当てられた。

2003年度において実施された活動のためには、総額で291億3,800万ルピアの経費が投入された。その詳細は、以下の通りである。

① 5,338ヘクタールの面積の3年目のゴム農園の手入れに69億4,900万ルピア(リアウ州APBD資金)、1,554ヘクタールの面積の4年目のゴム農園の手入れに20億ルピア(APBN資金)が支出された。このうちには、1,200ヘクタールの面積のゴム農園のリハビリ作業経費が含まれる。

② 国有電力会社(P.T. PLN)による20万匹の稚魚の放流を通じての漁業の振興。

③ バトゥ・ブルスラット村の総計250世帯向けの清潔な水施設の建設のために、25億ルピアの資金(APBN資金)が支出された。また、ビナマン村とボンカイ・イスティコマ村の簡易浄水システム(SIPAS)の建設のために、7億776万4,000ルピアの資金(SBAB資金)が支出された。

④ その他の種々のプログラムのために、カンパル県の APBD 資金から 137 億 6,724 万 5,500 ルピアが支出された(このうちには、ヤギと肉牛の家畜飼育、パティン、赤ニラなど換金魚の養殖漁業活動の振興、いけす船養殖漁業(keramba)用の網供給のための提供資金 3 億 4,500 万ルピアも含まれる)。

リアウ州カンパル県における「行動計画」の実施資金に関する詳細は、表 2 のうちに掲げられている。

コタパンジャン・プロジェクトによる影響を受けた二つの地域に関する「行動計画」の実施過程において、所要資金の割り当ての調整を行い、また同計画の進捗度のモニタリングを行うにあたって、調整チームは、直面している問題の解決を促進し、またそれへの対策を講ずるために会議を重ねている。それとともに、関係活動の実施が遅延状態にある場合には、早急な実施を促すために、統括チームと技術チームを通じて、関係諸機関に対して書簡を送付している。

調整チームによって行われた活動と会議の詳細は、表 3、4、5 および付属書 7、8、9 において掲げられている。

表1 西スマトラ州リマプル・コタ県における
コトパンジャン「統合行動計画」の実施資金

番号	活動	2002年度(実施済み)		2003年度(実施済み)		2004年度		
		総額(100万ルピア)	資金源	総額(100万ルピア)	資金源	必要額	割当見積額 ¹	備考
1	ゴム農園の造成	343	APBN	6,120	APBN	9,100	6,120	450ヘクタールの植え付け、20キロメートルの農園道路、および700ヘクタールの面積の手入れ
2	清潔な水施設と環状道路	100	州APBD	6,375	APBN	2,000	2,000	半恒久的な橋梁と環状道路の建設
3	家畜飼育事業の展開	³		185	州APBD	1,170	830	263頭の肉牛の分配
4	養殖漁業事業の展開	950	APBN			900	²	2州(西スマトラ州とリアウ州)をまたがる形での養殖漁業の展開
5	調整活動	³		50	州APBD	464	²	
				220	県APBD			

〔脚注〕

- (1) 2003年12月22～23日に現地調査を行った際に入手された2004年度のAPBN資金の割当金額に関する情報。
- (2) 情報を入力できない。
- (3) 「統合行動計画」から支出された活動・調整の実施資金。

表2 リアウ州カンパル県におけるコトパシジャン
「行動計画」の実施資金

番号	活動	2002年度(実施済み)		2003年度(実施済み)		2004年度		
		総額(100万ルピア)	資金源	総額(100万ルピア)	資金源	必要額	割当見積額 ¹⁾	備考
1	ゴム農園の造成と手入れ	3		2,000	APBN	9,000	2,000	P. IV 5,338ヘクタールとP. V 1,554ヘクタールの手入れ
2	交通施設の増強/補修 アログラム	3		600	APBN	2	2	
3	清潔な水施設の建設	3		555	州APBD	2	2,500	
4	PIR沼地地域の排水施設の建造	3		2,500	APBN	2	2	
5	カンパル県APBD資金からの支出による各種活動	3		960	州APBD	2	2	
6	住民の生活上、住民経済の高揚事業、および教育施設の充実にカパーする各種活動	345 5,500	APBN 州APBD	15,574	県APBD	2	2	

〔脚注〕

- (1) 2003年12月18～19日に現地調査を行った際に入手された2004年度のAPBN資金の割当金額に関する情報。
- (2) 情報を入手できない。
- (3) 「行動計画」から支出された活動・調整の実施資金。

表3 コトパンジャン調整チーム会議招待者リスト

番号	文書番号	招待元	招待先	案件	日付	議題
1	050/Bappeda-SDA/2003/007	リアウ州BAPPEDA	居住環境省 移住省 海洋漁業省	PLTAコトパンジャン 長期統合行動計画 (CAP)	2003年1月8日	PLTAコトパンジャン建設後の長期「統合行動計画」(CAP)についてのカンパル県とJBIC/SAPSチームとの間の討議
2	0268/Dt.7.5/01/2003	PEPP局	国有電力会社(PLN) BAPPENAS関係機関	PLTAコトパンジャン 会議の招待者	2003年1月21日	PLTAコトパンジャン「環境行動計画」と今後の「行動計画」の策定についての最近の進捗度についての討議
3	0376/Dt.5.5/1/2003	Dit. Pengendalian SDAとLH		PLTAコトパンジャン	2003年1月28日	土砂堆積と水質に関する第1次報告書についての討議
4	0579/Dt.7.5/02/2003	PEPP局	地方政府(PEMDA) 技術省 国有電力会社(PLN) BAPPENAS	PLTAコトパンジャン 会議	2003年2月13日	2002年度「行動計画」の実施進捗度の討議 2003年度「行動計画」の実施準備と当面の問題に対する対策についての討議
5	0816/D.7/02/2003	UTI Pendanaan 建設局	地方政府(PEMDA) 各省庁	コトパンジャン水力 発電所(HEPP)の問題 処理についての調整 チーム会議	2003年2月25日	「統合行動計画」(CAP)の実施計画および西スマトラ州、リアウ州、環境影響の面での当面の問題についての討議
6	2333/D.7.5/05/2003	PEPP局	国有電力会社(PLN) BAPPENAS JBIC	PLTAコトパンジャン 会議の招待者	2003年5月21日	国有電力会社(P.T. PLN)の立場の明確化/説明 (特にPLTAコトパンジャンの操業問題と再定住問題に関して)

番号	文書番号	招待元	招待先	案件	日付	議題
7	3155/Dt.7.5/07/2003	PEPP局		コトパンジンヤン会議 招待者	2003年7月4日	ホストSAPSモニタリング・チームの活動計画、 清潔な水プログラムの実進捗度、PLTAコト パンジンヤン「行動計画」案についての討議
8	3425/Dt.7.5/07/2003	PEPP局	地方政府(PEMDA) 各省市 BAPPENAS	リアウ州PLTAコトパ ンジンヤン水力発電所 (HEPP)の「統合行動計 画」(CAP)の実進捗 会議の招待者	2003年7月21日	2003年度「統合行動計画」(CAP)の実進捗のモ ニタリングと評価、並びに2004年度の資金割 当案
9	3426/Dt.7.5/07/2003	PEPP局	地方政府(PEMDA) 各省市 BAPPENAS	西スマトラ州PLTAコ トパンジンヤン水力発 電所(HEPP)の「統合行 動計画」(CAP)の実進 捗会議の招待者	2003年7月21日	2003年度「統合行動計画」(CAP)の実進捗のモ ニタリングと評価、並びに2004年度の資金割 当案
10	3927/Dt.7.5/08/2003	PEPP局	同上	2003年度コトパンジン ヤン「統合行動計画」 (CAP)の実進捗のモ ニタリング	2003年8月14日	2003年度「統合行動計画」(CAP)の実進捗の進 捗度に関してのモニタリング/評価活動
11	005/587/KD-X/2003	西スマトラ州SETDA	PEPP局	コトパンジンヤンPLTA プロジェクト関連の ゴム農園の植え付け 資金の配分先	2003年10月1日	
12	5489/Dt.7.5/11/2003	PEPP局	地方政府(PEMDA) 各省市 BAPPENAS	西スマトラ州リマプ ル・コタ県における コトパンジンヤン「統合 行動計画」(CAP)の実 進捗	2003年11月5日	2003年度コトパンジンヤン「統合行動計画」の実 進捗の進捗度のモニタリングと評価
13	0075/Dt.7.5/01/2004	PEPP局	BAPPENAS関係機関 移住省関係機関 BAPPEDA局長 KADIS その他	コトパンジンヤン問題	2004年1月7日	①2004年度「行動計画」(AP)の実進捗の強化 ②当面の問題への対応策についての討議

表4 コトパンジャン「行動計画」の実施のモニタリング調整会議の議事録

番号	日付	場所	会議主催者	議題	会議結果
1	2002年11月11日(月曜日)	BAPPENAS SG5	①多国籍間海外融資局長	①西スマトラ州(リマプル・コタ県)の「統合行動計画」(CAP)の実施準備についての討議 ②SAPSチームの第3段階の活動についての説明 環境影響に関する「統合行動計画」(CAP)の作成準備についての討議	添付書類
2	2002年11月12日(火曜日)	BAPPENAS SG4	①多国籍間海外融資局長	2002年度「行動計画」の実施進捗度と2003年度「行動計画」の準備についての討議	添付書類
3	2003年2月18日(火曜日)	BAPPENAS SG5	PEPP局長	①2003年度「統合行動計画」(CAP)(リアウ州)の実施状況のモニタリングと評価	添付書類
4	2003年7月28日(月曜日)	BAPPENAS SG4	①建設融資入札次長 ②PEPP局長	①2003年度「統合行動計画」(CAP)(西スマトラ州)の実施状況のモニタリングと評価	添付書類
5	2003年7月28日(月曜日)	BAPPENAS SG4	①建設融資入札次長 ②PEPP局長	①2003年度「統合行動計画」(CAP)(西スマトラ州)の実施状況のモニタリングと評価 ②2004年度「統合行動計画」(CAP)案(西スマトラ州)についての討議	添付書類

表5 コトパンジャン調整チームの現地訪問

番号	文書番号	派遣機関	訪問先	案件	日付	議題
1	2002/Dt.7.5/04/2003	PEPP局	関係機関	PLTAコトパンジャンの合同ミッションとPLTA移住地の訪問	2003年4月29日	PLTA移住地の再建プロジェクト計画、およびPLTAコトパンジャンに関するJBICとインドネシア政府の合同ミッション
2	452/2/V/Bappeda-LK/2003	リマプル・コタ県WABUP PEPP局	PEPP局長	PLTAコトパンジャンの社会活動	2003年5月21日	タンジュン・バリット村とタンジュン・パウ村の村民に対する社会化
3	3175/Dt.7.5/07/2003	PEPP局	関係機関	PLTAコトパンジャンのためのJBIC短期ホストSAPSモニタリング・コンサルタント	2003年7月7日	ポストSAPSモニタリング・チームの訪問
4	3927/Dt.7.5/08/2003	PEPP局	関係機関	2003年度コトパンジャン「統合行動計画」(CAP)の実施状況のモニタリング	2003年8月14日	事業影響を受けた地域に対する2003年度「統合行動計画」(CAP)の実施活動の進捗度のモニタリングと評価
5	5058/Dt.7.5/10/2003	PEPP局	BAPPEDA(西スマトラ州)	コトパンジャンHEPPのための日本政府とJBICのモニタリング・ミッション	2003年10月13日	PLTAコトパンジャンへの日本政府とJBICの訪問
6	6112/Dt.7.5/12/2003	PEPP局	BAPPEDA(リアウ州) 関係機関	西スマトラ州リマプル・コタ県のコトパンジャン「統合行動計画」(CAP)の実施状況のモニタリング	2003年12月17日	西スマトラ州リマプル・コタ県の2003年度「統合行動計画」(CAP)の実施状況のモニタリングと評価
7	6113/Dt.7.5/12/2003	PEPP局	関係機関	リアウ州カンパル県のコトパンジャン「統合行動計画」(CAP)の実施状況のモニタリング	2003年12月17日	リアウ州カンパル県の2003年度「統合行動計画」(CAP)の実施状況のモニタリングと評価

表6 コトパンジャン「行動計画」の実施のための援助資金割り当て申請書リスト
(2002年度、2003年度および2004年度)

番号	文書番号	申請元	申請先	案件	日付	備考
1	5832/D.V/12/2001	外国建設共同作業 支出次長	DEPHUT事務局長	PLTAコトパンジャン地域の再植 林・保全活動のための援助支出 金の割り当て	2001年12月24日	2002年度における再植林活動と野生動物の 保全活動のための援助支出金の割り当ての 必要
2	5811/D.V/12/2001	外国建設共同作業 支出次長	海洋漁業省事務 局長	PLTAコトパンジャンの建設後の 再定住地における問題処理のた めの援助支出金の割り当て	2001年12月14日	2002年度における住民の漁業活動のための 援助支出金の割り当ての必要
3	5833/D.V/12/2001	外国建設共同作業 支出次長	移住省事務局長	PLTAコトパンジャンの建設後の 再定住地における問題処理のた めの援助支出金の割り当て	2001年12月24日	2002年度における住民のゴム農園と食糧用 地での活動のための援助支出金の割り当て の必要
4	5403/D7/11/2002	建設融資入札次長	居住環境省事務 局長	PLTAコトパンジャンの建設後の 再定住地における影響処理のた めの援助支出金の割り当て(リ マプル・コタ県)	2002年11月11日	再定住地における清潔な水施設のリハビリ と農道の建設のための2003年度における援 助資金の割り当ての必要
5	5404/D7/11/2002	建設融資入札次長	移住省事務局長	PLTAコトパンジャンの建設後の 再定住地における影響処理のた めの援助支出金の割り当て(リ マプル・コタ県)	2002年11月11日	ゴム農園と食糧用地での活動のための2003 年度における援助資金の割り当ての必要
6	5869/Dt.7.5/12/2002	PEPP局長	居住環境省都市 ・農村局長	PLTAコトパンジャンの建設後の 再定住地における影響処理のた めの援助支出金の割り当て	2002年12月4日	文書番号5403/D7/11/2002のうちに掲げられ る活動支出金の割り当てに關しての確認
7	5870/Dt.7.5/12/2002	PEPP局長	移住省家畜生産 局長	PLTAコトパンジャンの建設後の 再定住地における影響処理のた めの援助支出金の割り当て	2002年12月4日	文書番号5404/D7/11/2002のうちに掲げられ る活動支出金の割り当てに關しての確認

番号	文書番号	申請元	申請先	案件	日付	備考
8	5868/Dt.7.5/12/2002	PEPP局長	移住省農園生産局長	PLTAコトパンジャンの建設後の再定住地における影響処理のための援助支出金の割り当て	2002年12月4日	文書番号5404/D7/11/2002のうちに掲げられる活動支出金の割り当てに関する確認
9	5575/D.7/11/2002	建設融資入札次長	西スマトラ州知事	PLTAコトパンジャンの建設後の再定住地における影響処理のための援助支出金の割り当て	2002年11月19日	清潔な水施設の建設/リハビリのための2003年度における47億7,000万ルピアの援助資金の割り当ての必要
10	3379/Dt.7.5/07/2003	PEPP局長	西スマトラ州BAPPEDA局長、リマプル・コタ県BAPPEDA局長	2004年度「統合行動計画」(CAP)のための活動計画と資金源	2003年7月17日	2004年度におけるコトパンジャン「統合行動計画」(CAP)のための活動計画と資金源についての調査要求
11	3380/Dt.7.5/07/2003	PEPP局長	リアウ州BAPPEDA局長、カンパル県BAPPEDA局長	2004年度「統合行動計画」(CAP)のための活動計画と資金源	2003年7月17日	2004年度におけるコトパンジャン「統合行動計画」(CAP)のための活動計画と資金源についての調査要求
12	5711/D7/11/2003	建設融資入札次長	移住省事務局長	コトパンジャンのための援助支出金の割り当て(リアウ州)	2003年11月17日	再定住地におけるゴム農園の造成/リハビリ活動の継続のための必要資金の2004年度における割り当て
13	5712/D7/11/2003	建設融資入札次長	移住省事務局長	コトパンジャンのための援助支出金の割り当て(西スマトラ州)	2003年11月17日	再定住地におけるゴム農園の造成/リハビリ活動の継続のための必要資金の2004年度における割り当て
14	5713/D7/11/2003	建設融資入札次長	海洋漁業省事務局長	コトパンジャンのための援助支出金の割り当て(西スマトラ州)	2003年11月17日	再定住地における漁業事業活動の継続のための必要資金の2004年度における割り当て
15	5714/D7/11/2003	建設融資入札次長	居住環境省事務局長	コトパンジャンのための援助支出金の割り当て(西スマトラ州)	2003年11月17日	再定住地における清潔な水施設の建設/リハビリの継続のための必要資金の2004年度における割り当て
16	5715/D7/11/2003	建設融資入札次長	海洋漁業省事務局長	コトパンジャンのための援助支出金の割り当て(リアウ州)	2003年11月17日	再定住地における漁業事業活動の継続のための必要資金の2004年度における割り当て
17	5716/D7/11/2003	建設融資入札次長	居住環境省事務局長	コトパンジャンのための援助支出金の割り当て(リアウ州)	2003年11月17日	再定住地における清潔な水施設の建設/リハビリの継続のための必要資金の2004年度における割り当て

表7 コトバンジャン・プロジェクトの「行動計画」の実施の進捗度の調整とモニタリングの枠組みにおいての関係機関に対する注意喚起書のリスト

番号	文書番号	発信元	受信先	案件	日付	備考
1	5835/D.7.12/2002	建設融資入札次長	西スマトラ州BAPPEDA局長	タンジュン・バリット村とタンジュン・バウ村の「行動計画」の下での活動の実施	2002年12月3日	2002年度における活動が、未だ実施されていないことが明白であり、また村長と住民が、未だ実施予定の活動計画について知らない。
2	0089/Dt.7.5/01/2003	建設融資モニタリング・評価局長	リアウ州BAPPEDA局長	リアウ州PLTAコトバンジャン「統合行動計画」	2003年1月8日	活動と支出割り当ての確認のために、中央レベルの関係機関が関与する必要があることを提案
3	0704/Dt.7.5/02/2003	建設融資モニタリング・評価局長	リマプル・コタ県PN事務所長	農園の所有関係の明確化	2003年2月19日	農園の所有関係データの明確化(PARs全員の農園面積)
4	0706/Dt.7.5/02/2003	建設融資モニタリング・評価局長	西スマトラ州家畜担当事務所長	タンジュン・バリット村とタンジュン・バウ村の「行動計画」の下での活動の実施の加速化	2003年2月20日	2003年度の資金計画に関して、西スマトラ州BAPPEDAと共同して、最初の活動に着手するよう要請
5	0707/Dt.7.5/02/2003	建設融資モニタリング・評価局長	西スマトラ州農園担当事務所長	タンジュン・バリット村とタンジュン・バウ村の「行動計画」の下での活動の実施の加速化	2003年2月20日	2003年度の資金計画に関して、西スマトラ州BAPPEDAと共同して、最初の活動に着手するよう要請
6	0708/Dt.7.5/02/2003	建設融資モニタリング・評価局長	西スマトラ州住居地担当事務所長	タンジュン・バリット村とタンジュン・バウ村の「行動計画」の下での活動の実施の加速化	2003年2月20日	2003年度の資金計画に関して、西スマトラ州BAPPEDAと共同して、最初の活動に着手するよう要請
7	1279/Dt.7.5/03/2003	建設融資モニタリング・評価局長	西スマトラ州BAPPEDA局長	PLTAコトバンジャンの影響に対する2003年度「行動計画」の実施一覧表	2003年3月21日	2003年度「行動計画」の実施一覧表の草案の完成
8	1280/Dt.7.5/03/2003	建設融資モニタリング・評価局長	リアウ州BAPPEDA局長	PLTAコトバンジャンの影響に対する2003年度「行動計画」の実施一覧表	2003年3月21日	2003年度「行動計画」の実施一覧表の草案の完成

番号	文書番号	発信元	受信先	案件	日付	備考
9	1771/Dt.7.5/04/2003	建設融資モニタリング・評価局長	リアウ州BAPPEDA局長	PLTAコトバンジャンの影響に対する2003年度「行動計画」の実施一覧表	2003年4月16日	2003年度「統合行動計画」(CAP)の実施一覧表の完成の加速化のための特別措置
10	1772/Dt.7.5/04/2003	建設融資モニタリング・評価局長	西スマトラ州BAPPEDA局長	PLTAコトバンジャンの影響に対する2003年度「行動計画」の実施一覧表	2003年4月16日	2003年度「統合行動計画」(CAP)の実施一覧表の完成の加速化のための特別措置
11	3953/Dt.7.5/08/2003	建設融資モニタリング・評価局長	リアウ州BAPPEDA局長	コトバンジャンに関する「統合行動計画」	2003年8月15日	コトバンジャンのための長期間にわたる「統合行動計画」(CAP)の策定問題の解決を調整する共同作業の要請
12	3954/Dt.7.5/08/2003	建設融資モニタリング・評価局長	西スマトラ州家畜担当事務所長	コトバンジャン「行動計画」における家畜飼育事業プログラム	2003年8月15日	家畜飼育の支援方式に関してのPAFsとの間の問題解決と調整
13	3955/Dt.7.5/08/2003	建設融資モニタリング・評価局長	西スマトラ州漁業担当事務所長	コトバンジャン「行動計画」における漁業事業プログラム	2003年8月15日	コトバンジャン・ダム貯水池地域での2003年度における漁業事業活動の実施の確認
14	3956/Dt.7.5/08/2003	建設融資モニタリング・評価局長	リアウ州漁業担当事務所長	コトバンジャン「行動計画」における漁業事業プログラム	2003年8月15日	コトバンジャン・ダム貯水池における「いけず船養殖漁業」(keramba)事業問題と同貯水池に放流される魚種問題の解決の調整
15	4115/Dt.6.3/8/2003	住居・住宅地局長	居住環境省西部地区都市・農村局長	PLTAコトバンジャンの建設影響への対処	2003年8月26日	PLTAコトバンジャンの建設影響に対処するための活動の実施のモニタリング計画における現地訪問の結果
16	4129/Dt.5.1/08/2003	食糧・農業局長	農業省家畜生産局長	コトバンジャン「行動計画」における家畜飼育事業プログラム	2003年8月27日	文書番号3954/Dt.7.5/08/2003のうちに掲げられる問題の解決のための提案
17	4677/D.7/09/2003	建設融資部門次長	西スマトラ州知事	コトバンジャン「行動計画」	2003年9月24日	「統合行動計画」(CAP)の実施進捗度について、現地派遣の技術チームによって2003年8月20～22日に実施されたモニタリングの結果
18	4678/D.7/09/2003	建設融資部門次長	リアウ州知事カンパル県知事	コトバンジャン「行動計画」	2003年9月24日	「統合行動計画」(CAP)の実施進捗度について、現地派遣の技術チームによって2003年8月27～28日に実施されたモニタリングの結果

Ⅲ 実施障害と解決方法

コタバンジャン「行動計画」の実施の過程においては、以下のような幾つかの障害と解決方法が見い出されている。

A 西スマトラ州

1. 西スマトラ州リマプル・コタ県の「統合行動計画」の実施のための資金調達メカニズムの下では、大部分の資金(92%)が、APBN分権化資金を通じて割り当てられている。しかしながら、リマプル・コタ県政府と共同して、この計画の実施者として行動する州レベルでの諸機関の間においては実施調整上の問題が発生している。

2003年7月17日と12月7日に、リマプル・コタ県知事は、BAPPENASの建設融資次長に対して要請書を提出した。そのうちにおいては、2004～2008年の期間の「統合行動計画」への援助資金については、管理チームの委員長が支出割り当てを行うこと、またこの計画が、リマプル・コタ県政府によって直接に実施される可能性があることについて記されていた(当該文書のコピーとそれへの西スマトラ州知事の見解については、添付書類11を参照)。

県政府と州レベルの関係機関との間での調整の弱さは、すでに現場での円滑な実施に影響を与えている。特に事業影響を受けた住民への直接的な社会化活動、さらにゴム農園の造成、家畜の飼育、清潔な水などの活動への動員の面で支障が生じている。

この問題を克服するためにすでに講じられている方法としては、プロジェクトの管理と現場での実施の双方の面で、県政府機関の役割を一段と増大する形で、州レベルの関係機関と県政府との間の調整を強化するよう、州知事と県知事に対して要請がなされている。

2. リマプル・コタ県の監督・評価委員会(KPE)は、未だ十分に機能してきていない。そのため、多くの情報が、住民によって正確に受け取られておらず、その結果しばしば誤解が発生してきている。KPEの機能を補うために、技術チームが、定期的に現地視察を行っており、その際に村人と直接に会見または対話を行ったりしている。これらの活動は、本来、KPEによって行われるべき事柄である。技術チームはまた、実施の進捗と情報の提供の面で、KPEが、より積極的な役割を演ずることができるよう提案している。

3. 2003年9月に発足することが計画された情報センターは、未だに実現されるに至っていないことは明らかである。その結果、行動計画(活動、経費および日程)の実施に関して、また影響対策(同様に、すでに合意されている「統合行動計画」)の進展に関して、事業影響を受けた住民による正確な情報の入手が、ますます難しくなっている。調整チーム— 技術チームの事務局としてのBAPPENAS建設融資モニタリング・評価局— によって講じられる予定の方法として準備が進められているのは、2004年度に計画される事柄についての情報を、ウェブサイトを通じて流すことである。

B リアウ州

リアウ州とカンパル県の双方の地方議会(DPRD)によって指向されている対策アプローチの仕方は、西スマトラ州リマプル・コタ県で講じられているやり方とは異なっている。つまり、事業影響への対処策は、特別の方法で計画および実施されるのではなく、通常の方法で講じられるのである。その結果、講じられた対処策を、総体として示すことは困難である。

言い換えれば、必要資金については、当地の政府による援助資金の供与の保証もないし、また中央

政府から援助資金の支出もないということになる。例えば、事業影響を受けた14ヵ村の清潔な水施設の対策費としては、およそ300億ルピアの資金が必要であると見積られるが、この点でのAPBN資金の年間割り当ては、約25億ルピアにすぎない。これでは、かかる清潔な水施設を完成するには、10年以上の歳月が必要となる。

今日に至るまで、前記の資金問題は、未だに解決していないばかりか、その他の代替的な支出源も存していない。

2. カンパル県において新たに講じられている影響対策のプロセスは、事業影響を受けた各村ごとに「必要な施設を確認する」という段階にとどまっている。ただし、この点での覚書(Berita Acara)は、すべての村々の村長によって、すでに署名されている。資金的限界に留意しつつ、先のように確認された必要施設について、それらの間に優先順位をつけて、資金総額のうちから必要度の高いものに資金投入して行かねばならない。

3. 資金問題と前記の優先順位の問題が、未だに解決していないために、(総合的な形での「行動計画」には)様々な政府機関が関係することとなり、その結果として当該計画の実施の進捗の上での調整とモニタリングに支障をきたすこととなっている。

4. カンパル県と生活環境への影響に関係する機関との間での環境影響対策の面での調整不足は、当地の環境条件を悪化させる潜在的可能性を有している。例えば、森林伐採、PLTAダム貯水池周辺での見境のない採石、いけす船養殖漁業(keramba)の設置の増大、および野生動物の取り扱いについては、未だに何らの対応策も講じられてきていない。BAPPENASの関係当局は、すでに対応のための調整措置を講ずる旨を明らかにしており、この点は、「環境影響に関する統合行動計画」のうちに盛り込まれている(付属書12を参照)。

5. コタパンジャン・ダム貯水池の管理と利用については、西スマトラ州リマプル・コタ県とリアウ州カンパル県との間で、未だに一体的な措置が講じられてきていない。コタパンジャン・ダム貯水池の利用配置図を直ちに策定する必要がある。そして、利用割り当てのゾーニングを行うとともに、許認可制を導入する必要がある。ただし、今日までのところ、このような調整問題について明白な権限を有する政府機関は存していない。

IV. 要約と勧告

1. コタパンジャン・ダムの影響への対応策は、すでに2002年度以来、「統合行動計画」を通じて講じられてきている。しかしながら、この計画の実施上の調整が、依然として必要である。特に中央政府機関と地方政府機関との間の資金配分の調整が必要である。その他に、重要な問題として強調しておく必要があるのは、資金の一部の転用の問題と地方政府の側での実施責任の問題である。これらの問題は、とりわけ当地の住民に重要な対策上の影響をもたらすことに留意しなければならない。それ故、克服目標とされる影響対策活動を通じて、継続的な建設事業のための「主体性」(ownerships)の意識を育成することができる点への理解が必要である。

2. 影響対策を実施する上では、インドネシア政府が、日本政府とJBIC(借款供与者として)、および事業影響を受けた住民の側での不断の参画を保証する形で進められなければならない。それ故、西スマトラ州リマプル・コタ県のために合意された「統合行動計画」は、継続的に実施されなければならない。また、影響対策計画が、リアウ州政府とカンパル県政府によって、定常的な方法で実施されなければならない。この問題については、調整チームは、モニタリングを実施する上で、非常に重要な役割を担っており、この目的のために一貫して作業を進めることを約束している。

3. リマプル・コタ県政府への「直接援助」となったのは、分権化スキームのAPBN資金の割り当てメカニズムから転用するというアイデアであった。ただし、2008年までの実施資金の残額については、いま一度調べてみる必要がある。この問題は、予算見積りの手続きと運営の点で注目されるところである。なぜなら、「直接援助」は、当地の地方議会(DPRD)の認可という形が採られたからである。その結果、「行動計画」にそぐわない形で資金が利用されるという潜在的可能性が発生することとなった。

4. 調整チームの構成メンバーは、「コタパンジャン・プロジェクトの行動計画の実施進捗度のモニタリングのための調整チームの設立」についての情報相/BAPPENAS長官による2002年5月31日付の政令KEP.264/MENPPN/05/2002のうちにおいて掲げられた。このチームは、新たに生起する問題に留意して、完全なものとなるか、または改組される必要がある。このような問題としては、例えば、環境影響対策、コタパンジャン・ダム貯水池の利用配置図の策定の調整、幾つかの関係政府機関の再編成などがある。

5. ダム貯水池の利用配置に関して特に留意する必要があるのは、この貯水池が、西スマトラ州リマプル・コタ県とリアウ州カンパル県の二つの地区にまたがって位置しているという点である。現時点では、前記の関係政府のイニシアチブにより、一体化した方法で地域規則草案が策定されるとともに、「貯水池利用配置チーム」の設置の方向が打ち出されることが期待されるところである。近い将来、この計画の策定は、BAPPENASの地方部門と地方自治部門の次長レベルでの調整の下に進められることができよう。

6. リアウ州とカンパル県のAPBN資金と APBD資金には限界があることから、外国からの借款や贈与など、その他の代替的な資金源を探すことにより、影響対策の実施を加速化する必要がある。

7. PAFs原告の土地補償請求訴訟については、最高裁判所は、判決を急ぐ必要がある。